

## ANALISIS KETIMPANGAN PRODUKTIVITAS DAN DUALISME KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI BENGKULU

Armelly<sup>1</sup>, Novi Tri Putri<sup>2</sup>, Retno A. Ekaputri<sup>3</sup>, Lela Rospida<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi Pembangunan, FEB, Universitas Bengkulu, Indonesia  
[armellykanedi25@gmail.com](mailto:armellykanedi25@gmail.com)

<sup>2</sup>Ekonomi Pembangunan, FEB, Universitas Bengkulu, Indonesia  
[noviar2606@mail.com](mailto:noviar2606@mail.com)

<sup>3</sup>Ekonomi Pembangunan, FEB, Universitas Bengkulu, Indonesia  
[retnoae@unib.co.id](mailto:retnoae@unib.co.id)

<sup>4</sup>Ekonomi Pembangunan, FEB, Universitas Bengkulu, Indonesia  
[lelarspd@gmail.com](mailto:lelarspd@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze labor productivity inequality and labor dualism in Bengkulu Province. The method used is descriptive analysis, equipped with class typology and elasticity of employment. We are using employment data from BPS publications. The results show that by dividing business fields into 17 sectors in 2018 and 2019, labor productivity inequality is awfully unequal, which is indicated by a very high standard deviation rate. Meanwhile, labor dualism is led by informal workers by a percentage of over 60%. More workers with primary education are absorbed in the informal sector, whereas educated workers are mostly taken in the formal sector. The highest coefficient of labor absorption elasticity for legal workers occurred in 2016 (3.14) and for informal workers in 2015 (1.73).*

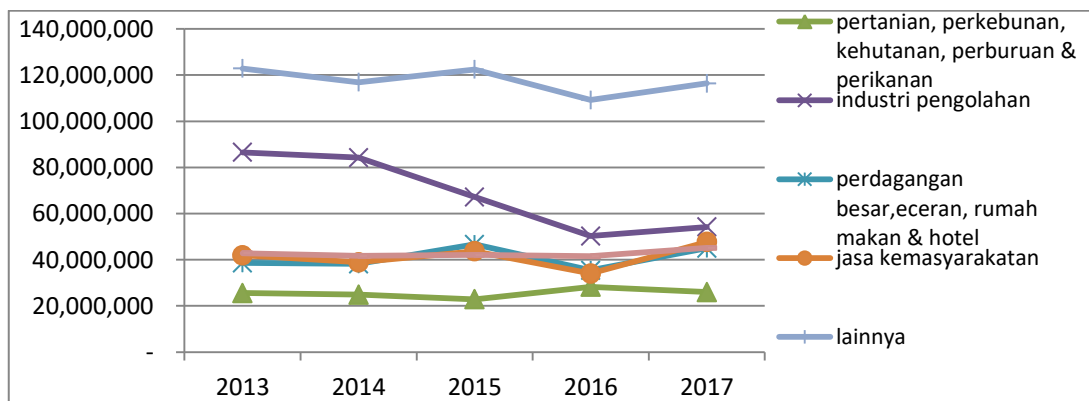
**Keywords:** labor dualism, labor productivity

### PENDAHULUAN

Produktivitas tenaga kerja menunjukkan seberapa besar nilai output yang dihasilkan oleh 1 orang tenaga kerja selama 1 tahun. Banyak hal yang dapat mempengaruhi besarnya angka produktivitas tenaga kerja, antara lain kualitas tenaga kerja yang bersangkutan, penguasaan teknologi, besarnya modal per tenaga kerja, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, perkembangan angka produktivitas secara umum hanya memberikan gambaran umum mengenai perubahan besarnya output dan tenaga kerja di masing-masing lapangan usaha.

Dari Gambar 1. terlihat bahwa produktivitas tenaga kerja antarsektor di Provinsi Bengkulu relatif berbeda jauh, terutama pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Hal ini ditunjukkan oleh nilai IW produktivitas tenaga kerja sektoral pada tahun tersebut yang relatif lebih tinggi. Tenaga kerja dengan produktivitas paling tinggi ada pada sektor 5 atau sektor lainnya (terdiri dari: pertambangan dan penggalan; listrik, gas dan air; bangunan; angkutan; perdagangan dan komunikasi; keuangan; asuransi; usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan). Sedangkan produktivitas tenaga kerja paling rendah adalah sektor 1

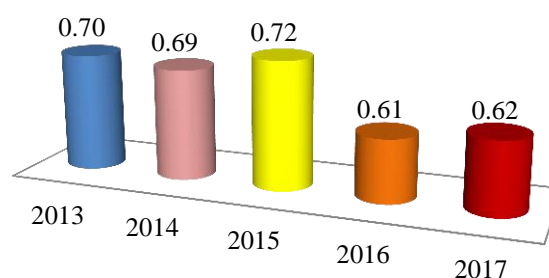
(pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan & perikanan). Rendahnya nilai produktivitas ini menunjukkan bahwa sektor 1 adalah sektor yang memiliki jumlah tenaga kerja paling tinggi di antara sektor lainnya, tetapi menghasilkan nilai tambah bruto (nilai produksi barang/jasa) yang tidak seimbang.



**Gambar 1.** Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral dan Total Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2017

*Sumber: Almahmudi, et al (2018)*

Rendahnya angka produktivitas tenaga kerja mengindikasikan banyaknya jumlah tenaga kerja di lapangan usaha bersangkutan yang tidak diikuti dengan memadainya jumlah faktor produksi yang lain atau corak produksi padat karya sebagaimana ciri dari lapangan usaha berbasis pertanian.



**Gambar 2.** Nilai Indeks Williamson Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2017

*Sumber: Almahmudi, et al (2018)*

Dari Gambar 2. dapat dilihat perkembangan nilai Indeks Williamson (IW) selama tahun 2013 hingga 2017. Terlihat secara umum ketimpangan produktivitas tenaga kerja sektoral di Provinsi Bengkulu menjadi lebih baik/lebih merata. Hal ini ditunjukkan oleh angka IW yang pada tahun 2013 ada di 0,70 menjadi 0,62 pada tahun 2017. Meskipun rentang nilai IW masih berada pada kategori timpang, akan tetapi tren menunjukkan penurunan.

Selain pengklasifikasian sektor berdasarkan lapangan usaha, dalam pasar tenaga kerja juga dikenal istilah dualisme yang berarti pemisahan ke dalam dua kelompok sektor. Dualisme pasar tenaga kerja secara umum terjadi di Indonesia. Dualisme ini tercermin pada segmentasi pasar tenaga kerja dalam dua sektor, yaitu formal dan informal. Ciri umum kedua segmentasi pasar tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Segmentasi Pasar Tenaga Kerja dalam Dua Sektor

Sektor Formal (modern)	Sektor Informal (tradisional)
Padat modal	Padat orang
Gunakan teknologi madya/tinggi	Gunakan teknologi tradisional
Terdidik ( <i>skills &amp; spesifikasinya</i> )	Kurang terdidik ( <i>skills &amp; spesifikasinya</i> )
Produktivitas tinggi	Produktivitas rendah
Bidang industri manufaktur	Bidang pertanian (industri sederhana)
Penghasilan tetap/tentu	Penghasilan tidak tetap/tentu
Di perkotaan	Di perdesaan

Sumber: Witjaksono, 2009

Selain itu, dalam Witjaksono (2009) juga disebutkan bahwa hipotesis dualisme pasar tenaga kerja juga menjadi landasan teori segmentasi pasar tenaga kerja ke dalam dua sektor, yaitu: Sektor yang memiliki tingkat upah tinggi dengan *benefit & return* yang tinggi pada modal manusia (*human capital*), namun terbatas jumlah lapangan kerja yang tersedia; dan Sektor yang memiliki upah rendah, dengan latar belakang kualifikasi individu tenaga kerja (TK) rendah, maupun yang berkualifikasi tinggi yang terpaksa masuk sektor ini karena rasionalisasi perusahaan.

Pada tahun 2018, basis data tenaga kerja yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu mengalami perubahan. Jika sebelumnya lapangan usaha terbagi menjadi 5, maka mulai tahun 2018 lapangan usaha telah menyesuaikan dengan 17 lapangan usaha sesuai dengan lapangan usaha dalam publikasi pendapatan daerah (PDRB). Oleh karena itu, dalam penelitian ini perkembangan nilai ketimpangan produktivitas tenaga kerja akan dianalisis sebagai lanjutan penelitian sebelumnya dengan penyesuaian jumlah lapangan usaha tersebut. Selain itu, analisis akan dilengkapi dengan kondisi dualisme ketenagakerjaan yang terjadi di Provinsi Bengkulu.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Model Pertumbuhan Neoklasik

Dalam Amstrong & Taylor (2000) dijelaskan bahwa fungsi produksi agregat didasarkan pada inti model pertumbuhan neoklasik. Dalam perekonomian tanpa kemajuan teknis, output ditentukan seluruhnya oleh faktor input modal dan tenaga kerja, dapat dituliskan dalam bentuk umum:  $Y = F(K, L)$  dimana Y adalah output riil, K cadangan modal dan L tenaga kerja. Bentuk spesifik dari hubungan di atas adalah fungsi produksi Cobb-Douglas.

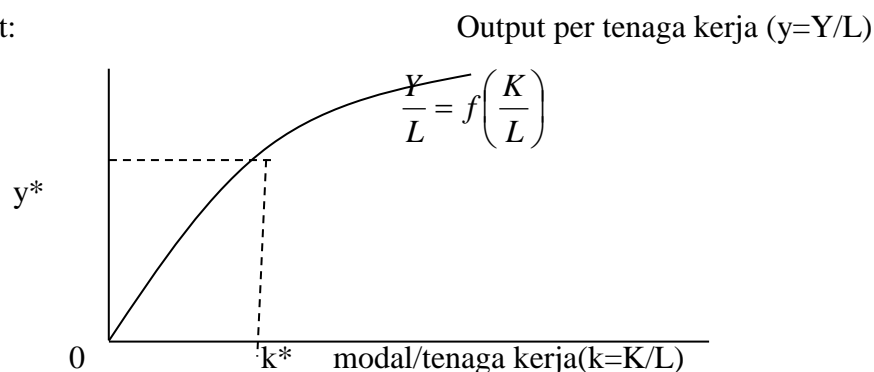
Dengan asumsi *constant returns to scale*, didapat:  $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$

dimana A dan  $\alpha$  merupakan parameter yang diukur (biasanya dengan analisis regresi).

Persamaan ini juga dapat dituliskan dalam bentuk per kapita dengan membaginya dengan

L:  $y = Ak^\alpha$  dimana  $y = Y/L$  dan  $k = K/L$ .

Dari fungsi produksi per kapita, output per tenaga kerja hanya dapat meningkat jika modal per tenaga kerja meningkat. Dengan kata lain, modal harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan penawaran tenaga kerja untuk output per tenaga kerja. Hubungan positif antara modal per tenaga kerja dan output per tenaga kerja ditunjukkan dalam gambar berikut:



**Gambar 3.** Rasio Output per Tenaga Kerja dan Rasio Modal per Tenaga Kerja

*Sumber: Amstrong & Taylor (2000)*

Output per tenaga kerja akan meningkat jika setiap pekerja diberikan peralatan modal yang lebih banyak -proses yang dikenal dengan *capital deepening*- tetapi peningkatan ini akan berada pada tingkat yang menurun melalui hasil marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal returns*). Lebih lanjut, ketika marginal produk tenaga kerja telah menurun sampai pada tingkat yang cukup rendah, investasi bersih akan menurun hingga titik 0 dan investasi gross akan cukup untuk memelihara cadangan modal yang telah ada. Rasio modal per tenaga kerja akan berada pada tingkat keseimbangan jangka panjang ( $k^*$ ). Rasio keseimbangan modal per tenaga kerja ini berhubungan dengan tingkat output per tenaga kerja keseimbangan  $y^*$ . Ketika keseimbangan ini tercapai, maka tidak akan ada insentif bagi para pengusaha untuk menaikkan lagi rasio modal per tenaga kerja. Karena

rasio modal per tenaga kerja dan rasio output per tenaga kerja dalam situasi keseimbangan konstan, sehingga ekonomi haruslah dalam kondisi keseimbangan jangka panjang.

Model pertumbuhan neoklasik yang lebih lengkap juga menunjukkan bahwa rasio keseimbangan modal per tenaga kerja  $k^*$  ditentukan sebagian oleh fungsi produksi dan sebagian lagi oleh fungsi lain merujuk kepada persamaan fundamental pertumbuhan. Fungsi yang terakhir menyatakan bahwa rasio modal per tenaga kerja akan terus meningkat ketika investasi gross per tenaga kerja melebihi tingkat dimana 1) menggantikan pemakaian peralatan modal, dan 2) menyediakan tambahan cadangan modal yang dibutuhkan oleh peningkatan tenaga kerja.

Dalam versi model pertumbuhan neoklasik yang paling sederhana, tidak ada pertumbuhan pendapatan per kapita dalam jangka panjang karena jangka panjang diartikan sebagai situasi dimana output, modal dan tenaga kerja tumbuh dengan tingkat yang sama. Output per tenaga kerja dapat meningkat dalam jangka menengah. Dari model neoklasik dapat disimpulkan:

1. Output meningkat tanpa batas ketika penawaran modal dan tenaga kerja meningkat.
2. Output per tenaga kerja dapat meningkat hanya jika adanya peningkatan peran modal (yaitu jika rasio modal per tenaga kerja naik).
3. Ketika rasio modal per tenaga kerja mencapai tingkat keseimbangan jangka panjang, maka tidak akan ada lagi peningkatan output per tenaga kerja. Pertumbuhan output per tenaga kerja mencapai batas akhir.

## B. Sektor Formal dan Informal

Perkin et al dalam Chrismardani & Satriawan (2018) membagi pasar tenaga kerja menjadi tiga bagian, yaitu sektor formal perkotaan (*urban formal sector*), sektor informal perkotaan (*urban informal sector*) dan pasar kerja pedesaan (*rural employment*). Sektor formal perkotaan merupakan pasar kerja yang diinginkan oleh setiap pekerja, baik pria maupun wanita. Pada pasar ini terdapat sektor pemerintah dan perusahaan besar seperti bank, perusahaan asuransi, pabrik dan perdagangan. Masyarakat dapat bekerja pada sektor ini dengan fasilitas yang lebih modern daripada jenis pasar kerja yang lainnya, dan merupakan daya tarik tersendiri adalah tingkat upah yang paling tinggi dan menawarkan pekerjaan yang menarik. Salah satu alasan mengapa tingkat upahnya lebih tinggi karena yang bekerja

pada pasar tersebut kebanyakan memiliki tingkat pendidikan tinggi dan menengah dari berbagai penjuru daerah.

Jenis pasar berikutnya adalah sektor informal perkotaan yang di dalamnya terdapat perusahaan yang lebih kecil. Terkadang tepi jalan merupakan tempat menjual/toko dan tempat produksi berbagai jenis barang dan jasa mereka. Kadangkala mereka harus berkompetisi dengan perusahaan yang lebih besar, dan terkadang mereka harus eksis pada permintaan yang tidak menguntungkan bagi sektor formal. Tidak jarang pula sektor informal kota ini memberikan lapangan pekerjaan bagi pekerja migran yang berasal dari pedesaan untuk mencari kerja di kota. Salah satu ciri khas dari sektor ini adalah mudah dimasuki oleh pekerja, meskipun ada kalanya kehadirannya justru dapat menurunkan upah bagi seluruh pekerja. Sedangkan pasar tenaga kerja di pedesaan cenderung memiliki tingkat upah yang lebih rendah dibandingkan sektor informal kota.

Bappenas (2019) menyebutkan bahwa dalam Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen dijelaskan bahwa belum ada kebulatan pendapat tentang batasan yang tepat untuk sektor informal di Indonesia, tetapi terdapat kesepakatan tidak resmi antara para ilmuwan yang terlibat dalam penelitian masalah-masalah sosial untuk menerima definisi kerja sektor informal di Indonesia sebagai berikut:

- a. Sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi dari pemerintah;
- b. Sektor yang belum dapat menggunakan (karena tidak mempunyai akses) bantuan, meskipun pemerintah telah menyediakannya;
- c. Sektor yang telah menerima bantuan pemerintah tetapi bantuan tersebut belum sanggup membuat sektor tersebut mandiri.

Dalam Sari (2016), disebutkan bahwa dalam menginterpretasikan definisi sektor formal dan informal Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendekatan melalui status pekerjaan utama dari pekerja, dimana pendekatan ini agak berbeda dengan pengelompokan yang dilakukan ILO (*International Labour Organization*). ILO mendefinisikan pekerja informal hanya mereka yang bekerja sebagai pekerja mandiri dan pekerja yang membantu keluarga, sedangkan BPS menambahkan mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas dan berusaha dibantu pekerja bebas. Hal ini disebabkan sifat pekerja bebas di Indonesia yang biasanya bersifat informal dengan upah yang tidak memadai, produktivitas rendah dan kondisi kerja yang relatif buruk.

Ulyssea dalam Tridiana & Widyawati (2018) menyatakan terdapat dualisme pasar tenaga kerja pada negara berkembang, yaitu sektor formal dan informal. Pada sektor formal dapat diterapkan kebijakan tenaga kerja, termasuk upah minimum, sedangkan pada sektor informal kebijakan upah minimum tidak dapat diterapkan. Beberapa kelemahan sektor formal antara lain biaya yang dibutuhkan lebih tinggi karena harus memenuhi prosedur, birokrasi dalam memuali suatu sektor formal, dan biaya tambahan untuk tetap berada dalam sektor formal karena pajak regulasi dan persyaratan lainnya. Demikian pula sektor informal juga memiliki kelemahan yaitu pekerja tidak memiliki akses pada hukum sehingga tidak terlindungi dan rentan terhadap risiko. Dampak upah minimum terhadap tenaga kerja pada sektor formal menyebabkan transisi tenaga kerja dari yang bekerja pada sektor formal menjadi bekerja pada sektor informal maupun tidak bekerja.

Berkaitan dengan hubungan antara sektor formal dan informal, Breman dalam Bappenas (2019) menyimpulkan bahwa hubungan antara keduanya tidak bisa dilihat sebagai dualitas dari dua sektor yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hubungan ketergantungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketertinggalan dan ketidakberdayaan sektor informal merupakan syarat bagi kemajuan sektor formal, sedangkan hubungan antara kedua sektor menunjukkan subordinasi dan ketergantungan yang pertama kepada yang kedua.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi gambaran umum kondisi kependudukan, ketenagakerjaan, data perekonomian daerah (PDRB), dan data penunjang lainnya. Semua data sekunder yang digunakan meliputi data Provinsi Bengkulu dengan rentang tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 yang berasal dari data publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.

Rincian metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketimpangan produktivitas tenaga kerja sektoral di Provinsi Bengkulu digunakan analisis deskriptif khususnya angka rata-rata dan standard deviasi. Selain itu, pengklasifikasian sektor untuk melihat sebaran posisi sektor dalam perekonomian dilakukan dengan menggunakan analisis tipologi Klassen. Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor ekonomi berdasarkan produktivitas tenaga kerja yang ada. Untuk tujuan ini, indikator yang digunakan adalah pertumbuhan nilai sektoral dan produktivitas tenaga kerja sektoral.



2. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan khususnya perkembangan dualisme ketenagakerjaan yang terjadi di Provinsi Bengkulu digunakan analisis deskriptif. Analisis ini mencakup perkembangan jumlah tenaga kerja per sektor, perkembangan produktivitas tenaga kerja per sektor, proporsi, persentase dan analisis lain yang diperlukan. Selain itu, analisis juga akan membahas mengenai elastisitas penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal dengan menggunakan penghitungan elastisitas sebagai berikut:

$$\varepsilon = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$\varepsilon$  = elastisitas penyerapan tenaga kerja (total/ formal/ informal)

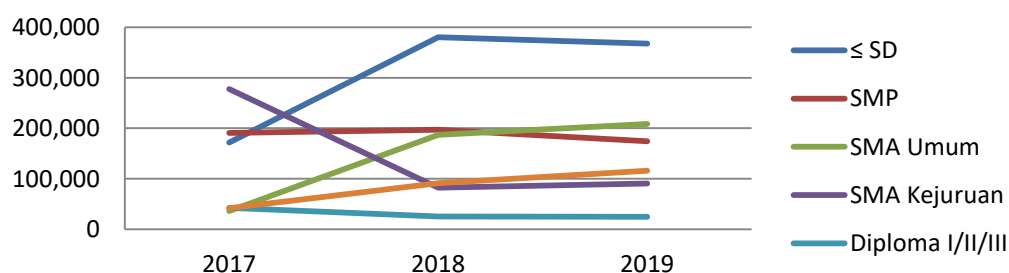
$\Delta y$  = perubahan output produksi atau Nilai Tambah Bruto (NTB) PDRB

$\Delta x$  = perubahan jumlah tenaga kerja (total, formal/ informal)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu

Dari data BPS pada tahun 2019 dari total penduduk Provinsi Bengkulu yang berusia 15 tahun ke atas 67,53% diantaranya adalah penduduk bekerja. 69,9% penduduk berusia 15 tahun ke atas merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 67,53% dan pengangguran terbuka sebanyak 2,37%. Sementara penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bukan merupakan angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang mengurus rumah tangga yaitu sebesar 17,41% dari total berusia 15 tahun ke atas.



**Gambar 4.** Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019

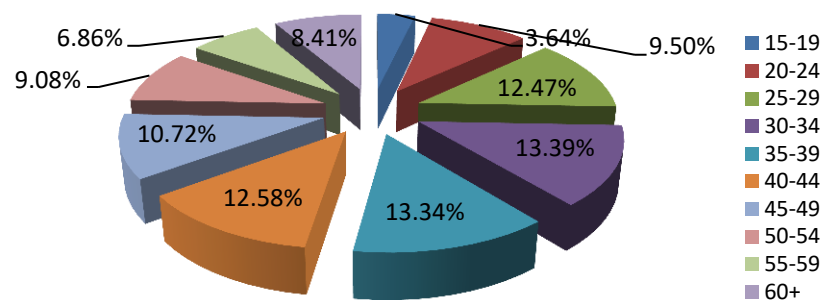
*Sumber: BPS Provinsi Bengkulu*

Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa tenaga kerja dengan pendidikan SMA Umum dan Universitas mengalami trend yang meningkat selama 3 tahun (Gambar 4). Untuk jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMP dan Diploma relatif stabil



hanya mengalami sedikit fluktuasi. Hal yang berbeda terjadi pada jumlah tenaga kerja dengan pendidikan SD dan SMA Kejuruan. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja dengan pendidikan SD mengalami peningkatan yang besar yang diikuti dengan sedikit penurunan di tahun 2019, sebaliknya jumlah tenaga kerja dengan pendidikan SMA Kejuruan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang besar dan diikuti sedikit peningkatan di tahun 2019.

Komposisi jumlah tenaga kerja menurut golongan umur dapat dilihat pada Gambar 5. Pada tahun 2019 tenaga kerja yang terserap di Provinsi Bengkulu didominasi oleh golongan umur 35-39 tahun dan 40-44 tahun (masing-masing sebesar 13,39% dan 13,34%. Persentase yang paling rendah ada pada golongan umur 15-19 tahun dengan persentase sebesar 3,64% diikuti golongan umur 55-59 tahun dengan persentase sebesar 6,86%.



**Gambar 5.** Komposisi Tenaga Kerja Menurut Golongan Umur di Provinsi Bengkulu Agustus 2019

*Sumber: BPS Provinsi Bengkulu*

Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja terbesar di Provinsi Bengkulu ada pada lapangan usaha A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) diikuti lapangan usaha G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Sedangkan lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja paling sedikit adalah lapangan usaha L (Real Estate) yang hanya menyerap 0,03% tenaga kerja diikuti lapangan usaha D (Pengadaan Listrik dan Gas) dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,28%. Beberapa lapangan usaha yang lain angka penyerapan tenaga kerja berkisar pada angka 5% dan sisanya di angka 1-3%. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor primer dalam ekonomi masih menjadi lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbesar (43,78%). Hal ini berkaitan dengan corak sektor primer dimana produksi masih bersifat padat karya dengan nilai tambah yang relatif kecil dibandingkan sektor industri (sekunder) dan jasa (tersier).

## 2. Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral Provinsi Bengkulu

Tabel 2 memberikan informasi mengenai output produksi atau nilai PDRB, jumlah tenaga kerja yang terserap, dan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Bengkulu untuk tahun 2018 dan 2019. Produktivitas tenaga kerja di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 adalah sebesar 45,85 juta rupiah/jiwa. Angka ini meningkat menjadi 47,26 juta rupiah/jiwa pada tahun 2019.

**Tabel 2.** PDRB (juta rupiah), Jumlah Tenaga Kerja (jiwa) dan Produktivitas Tenaga Kerja (juta rupiah/jiwa) Provinsi Bengkulu Tahun 2018 dan 2019

Kategori	Lapangan Usaha	2018			2019		
		PDRB	Jumlah TK	Produktivitas/TK	PDRB	Jumlah TK	Produktivitas/TK
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.309.491,83	474.705	25,93	12.736.100,68	429.497	29,65
B	Pertambangan dan Penggalian	1.523.471,78	15.270	99,77	1.561.672,79	14.473	107,90
C	Industri Pengolahan	2.718.549,86	52.647	51,64	2.781.317,18	57.322	48,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	41.675,19	1.841	22,64	43.876,15	2.762	15,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	96.172,76	6.480	14,84	99.847,19	5.154	19,37
F	Konstruksi	2.026.352,76	50.766	39,92	2.181.514,98	58.388	37,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.009.176,33	151.809	46,17	7.500.352,06	159.992	46,88
H	Transportasi dan Pergudangan	3.524.721,35	23.364	150,86	3.787.054,96	23.845	158,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	738.540,52	33.376	22,13	813.108,59	42.113	19,31
J	Informasi dan Komunikasi	2.018.282,38	2.882	700,31	2.169.504,70	6.548	331,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.397.114,98	9.257	150,93	1.393.659,13	10.807	128,96
L	Real Estate	1.964.354,32	942	2.085,30	2.045.691,73	309	6.620,36
M, N	Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.003.267,02	8.254	121,55	1.053.755,17	10.326	102,05
O	Jasa Pendidikan	3.929.762,63	51.955	75,64	4.123.335,73	58.243	70,80
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.774.170,27	46.561	59,58	2.882.253,32	54.063	53,31
Q	Jasa Lainnya	736.987,65	13.549	54,39	801.303,56	18.346	43,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	359.069,55	19.805	18,13	387.979,27	28.907	13,42
Total		44.171.161,19	963.463	45,85	46.362.327,16	981.095	47,26

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, data diolah

Jika dilihat dari lapangan usaha dimana tenaga kerja terserap, terlihat angka produktivitas tenaga kerja sektoral memiliki rentang yang sangat jauh. Produktivitas tenaga kerja

tertinggi ada pada lapangan usaha Real Estate (2.085,30 juta rupiah/jiwa di tahun 2018 dan 6.620,36 juta rupiah/jiwa di tahun 2019). Angka produktivitas yang tinggi pada lapangan usaha Real Estate ini disebabkan oleh peyerapan tenaga kerja yang paling sedikit dibandingkan lapangan usaha lainnya, sedangkan dari sisi output produksi tidak berbeda jauh dengan beberapa lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak.

Produktivitas tenaga kerja paling rendah ada pada lapangan usaha Jasa Lainnya yaitu sebesar 18,13 juta rupiah/jiwa pada tahun 2018 dan turun menjadi 13,42 juta rupiah/jiwa di tahun 2019. Lapangan usaha dengan jumlah penyerapan tenaga kerja terbanyak, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki angka produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah. Hal ini disebabkan karena corak padat karya yang melekat pada sektor primer (pertanian) sehingga pada sektor ini diperlukan jumlah tenaga kerja yang banyak tetapi dengan nilai tambah yang relatif kecil.

Untuk melihat kecenderungan sebaran data produktivitas sektoral, digunakan angka mean (rata-rata) dan standard deviasi (penyimpangan baku). Tabel 3 menyajikan kedua angka tersebut dengan pendekatan angka produktivitas tenaga kerja total dan produktivitas tenaga kerja per lapangan usaha untuk tahun 2018 dan 2019. Terlihat peningkatan pada angka rata-rata produktivitas baik dari sisi produktivitas tenaga kerja total maupun per lapangan usaha. Akan tetapi peningkatan ini juga dibarengi peningkatan angka penyimpangan baku yang juga meningkat tajam. Penyimpangan baku menunjukkan sebaran data terhadap angka rata-ratanya. Semakin tinggi angka penyimpangan baku berarti data tersebar semakin jauh dari angka rata-rata.

**Tabel 3.** Mean (Rata-rata) dan Standard Deviasi Produktivitas (juta rupiah/jiwa) Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu Tahun 2018 dan 2019

Keterangan	2018	2019
Produktivitas /TK Total		
Mean (Rata-rata)	45,85	47,26
Standard Deviasi	134,38	411,35
Produktivitas TK/Lapangan Usaha		
Mean (Rata-rata)	219,98	461,62
Standard Deviasi	126,67	397,25

*Sumber: hasil penelitian*

Secara umum tingginya angka penyimpangan baku ini disebabkan karena ada data yang merupakan data ekstrim dengan nilai yang sangat jauh dibandingkan data yang lain (dalam kasus ini lapangan usaha Real Estate). Pada tahun 2019 produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha Real Estate mengalami peningkatan lebih dari tiga kali lipat produktivitas pada tahun 2018. Hal ini salah satunya disebabkan karena penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap di lapangan usaha tersebut. secara umum dapat disimpulkan bahwa terjadi ketimpangan produktivitas tenaga kerja sektoral yang cukup tinggi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 dan menjadi semakin timpang pada tahun 2019.

Dari hasil klasifikasi yang dilakukan dengan menggunakan variabel pertumbuhan dan produktivitas tenaga kerja yang memodifikasi tipologi Klassen, terdapat 3 lapangan usaha yang tergolong ke dalam sektor prima, yaitu Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Perusahaan. Sementara lapangan usaha yang termasuk ke dalam klasifikasi sektor terbelakang adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sektor prima merupakan lapangan usaha yang memiliki tingkat pertumbuhan di atas tingkat pertumbuhan ekonomi, dan nilai produktivitas tenaga kerja di atas rata-rata produktivitas tenaga kerja. Sedangkan sektor terbelakang memiliki tingkat pertumbuhan dan produktivitas yang lebih rendah daripada rata-rata.

**Tabel 4.** Klasifikasi Lapangan Usaha Berdasarkan Pertumbuhan & Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2019

$\begin{matrix} \text{R} \\ \text{V} \end{matrix}$	$R_i > R$	$R_i < R$
$V_i > V$	Sektor Prima: H; J; M,N	Sektor Berkembang: B; C; E; K; L; O; P
$V_i < V$	Sektor Potensial: D; F; G; I; Q & R,S,T,U	Sektor Terbelakang: A

Sumber: hasil penelitian

Terlihat tujuh lapangan usaha masuk ke dalam klasifikasi sektor berkembang dan enam lapangan usaha masuk ke dalam klasifikasi sektor potensial. Sektor berkembang merupakan sektor dengan tingkat produktivitas di atas rata-rata namun tingkat pertumbuhan sektoralnya berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Sedangkan sektor potensial memiliki karakteristik yang bertolak belakang dengan sektor berkembang. Sektor potensial memiliki tingkat produktivitas di bawah rata-rata

produktivitas tenaga kerja namun tingkat pertumbuhan sektoralnya berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi.

### 3. Analisis Dualisme Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu

Secara umum pada tahun 2018 dan 2019 tenaga kerja yang terserap di Provinsi Bengkulu didominasi oleh tenaga kerja informal. Pada tahun 2018 tenaga kerja informal terserap sebanyak 68,17% dari total tenaga kerja dan sisanya sebanyak 31,83% merupakan tenaga kerja formal. Di tahun 2019 terjadi peningkatan persentase tenaga kerja formal yang terserap, menjadi 35,69% dan informal turun menjadi sebesar 64,31%.

**Tabel 5.** Perkembangan Persentase Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Pada Sektor Formal dan Informal Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2019 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2018		2019	
		Formal	Informal	Formal	Informal
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,06	44,21	5,75	38,03
B	Pertambangan dan Penggalan	0,76	0,82	0,52	0,96
C	Industri Pengolahan	1,92	3,54	2,40	3,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,03	0,26	0,02
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,				
E	Limbah dan Daur Ulang	0,28	0,39	0,19	0,34
F	Konstruksi	2,46	2,81	2,79	3,16
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi				
G	Mobil dan Sepeda Motor	4,23	11,53	4,89	11,42
H	Transportasi dan Pergudangan	1,03	1,40	1,04	1,39
	Penyediaan Akomodasi dan Makan				
I	Minum	1,27	2,20	1,23	3,06
J	Informasi dan Komunikasi	0,22	0,08	0,45	0,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,96	0,01	1,06	0,05
L	Real Estate	0,02	0,08	0,02	0,01
M, N	Jasa Perusahaan	0,58	0,28	0,57	0,48
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan				
O	dan Jaminan Sosial Wajib	5,39	0,00	5,94	0,00
P	Jasa Pendidikan	4,80	0,03	5,42	0,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,33	0,07	1,65	0,22
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,36	0,70	1,54	1,41
	Total	31,83	68,17	35,69	64,31

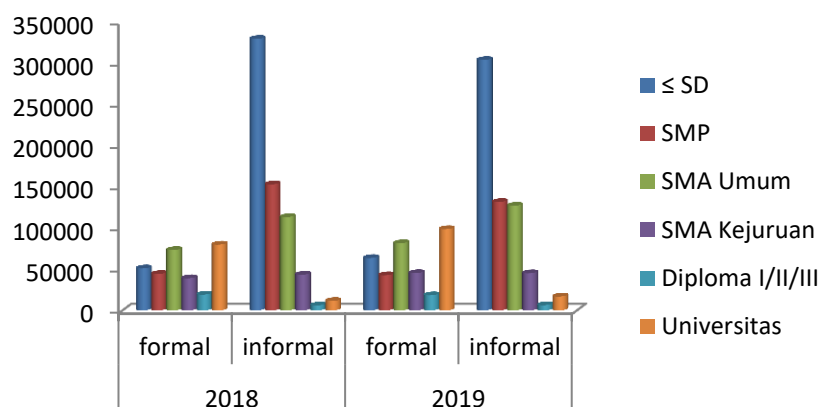
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, data diolah

Komposisi persentase jumlah tenaga kerja formal dan informal yang terserap menurut lapangan usaha selama tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel 5. Sebaran tenaga kerja formal pada tahun 2018 (31,83%) didominasi oleh penyerapan di lapangan usaha

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (5,39) serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (5,06%). Pada tahun 2019 dominasi penyerapan tenaga kerja formal masih di lapangan usaha yang sama dengan besaran persentase yang lebih tinggi (5,95% dan 5,75%).

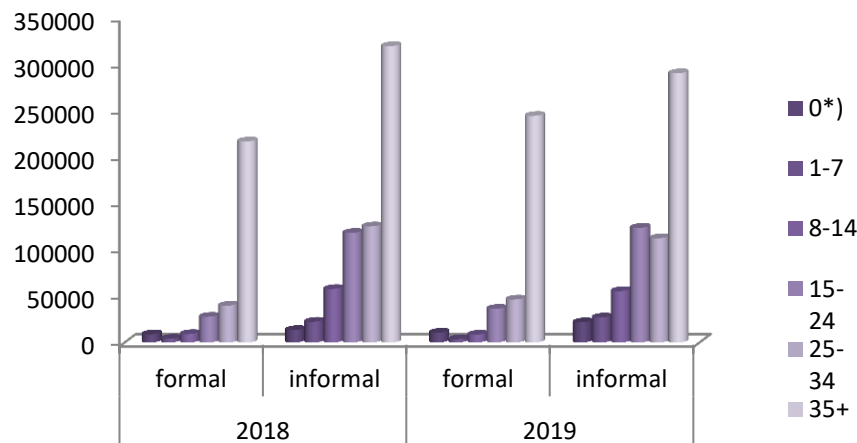
Tenaga kerja informal paling banyak terserap di lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan trend yang menurun di tahun 2019. Pada tahun 2018 dari 68,17% tenaga kerja informal yang ada 44,21% ada di lapangan usaha ini dan menjadi 38,03% di tahun 2019. Lapangan usaha yang juga menyerap banyak tenaga kerja informal adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ( 11,53% di tahun 2018 turun menjadi 11,42% di tahun 2019).

Analisis selanjutnya akan membahas mengenai tingkat pendidikan dan jumlah jam kerja tenaga kerja pada sektor formal dan informal. Gambar 6 menunjukkan komposisi tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan pada sektor formal dan informal tahun 2018 dan 2019. Kondisi pada tahun 2018 maupun 2019, terlihat tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dasar mendominasi sektor informal (SD dan SMP) sedangkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) sebagian besar terserap pada sektor formal. Hal ini sesuai dengan karakteristik sektor informal yang cenderung tidak mensyaratkan pendidikan formal untuk masuk ke dalam sektor tersebut. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Diploma dan Universitas terserap dengan jumlah yang sangat sedikit pada sektor informal jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah.



**Gambar 6.** Komposisi Tenaga Kerja Formal dan Informal Provinsi Bengkulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 dan 2019

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, data diolah



\*)sementara tidak bekerja

**Gambar 7.** Komposisi Jumlah Tenaga Kerja Formal dan Informal Provinsi Bengkulu Menurut Jam Kerja Tahun 2018 dan 2019

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, data diolah

Definisi menurut BPS, jumlah jam kerja adalah lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu yang lalu. Dari komposisi jam kerja, terlihat bahwa jam kerja baik tenaga kerja formal maupun informal didominasi oleh tenaga kerja dengan jam kerja 35+. Untuk tenaga kerja formal terdapat sekitar sekitar 70% tenaga kerja dengan jam kerja 35+, sedangkan untuk tenaga kerja informal sekitar 50%. Gambar 7. menunjukkan selisih jumlah yang sangat besar pada sektor formal antara jam kerja tertinggi (35+) dan kelompok jam kerja di bawahnya (25-34 jam). Sementara untuk sektor informal terlihat bahwa rentang jam kerja relatif lebih merata pada kelompok 15-24 jam dan 25-34 jam.

Tabel 6. menyajikan data persentase perubahan produktivitas tenaga kerja dan persentase perubahan proporsi jumlah tenaga kerja formal menurut lapangan usaha tahun 2018-2019. Dapat dilihat lapangan usaha mana saja yang mengalami peningkatan produktivitas tenaga kerja dan yang mengalami penurunan. Data ini disandingkan dengan perubahan proporsi tenaga kerja formal yang terserap di lapangan usaha yang sama.

Jika dilihat dari peningkatan produktivitas tenaga kerja, maka lapangan usaha Real Estate merupakan lapangan usaha dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja tertinggi di tahun 2019. Sebaliknya, lapangan usaha yang mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja paling besar adalah Informasi dan Komunikasi. Real Estate mengalami peningkatan



produktivitas tenaga kerja sebesar 217,48% dari tahun 2018. Peningkatan ini dibarengi dengan peningkatan proporsi tenaga kerja formal sebesar 42,43%. Sementara untuk Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha ini mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja sebesar 52,69% dan disertai dengan penurunan proporsi tenaga kerja formal sebesar 5,99% dibandingkan tahun 2018.

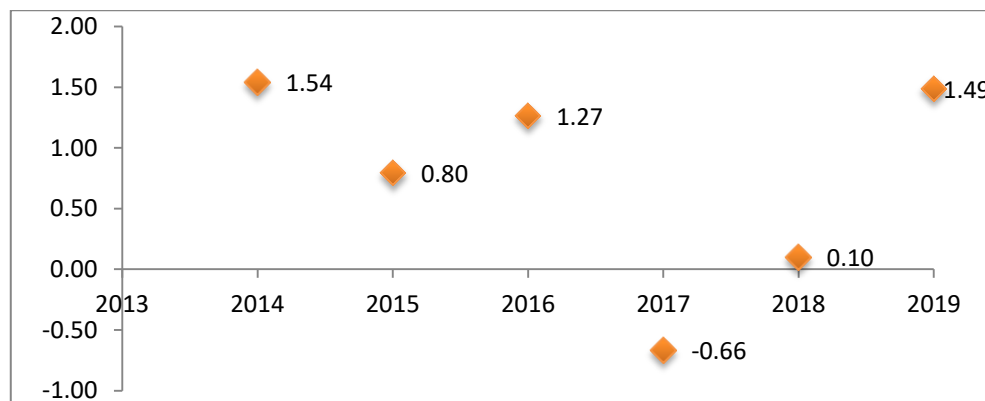
**Tabel 6.** Persentase Perubahan Produktivitas Tenaga Kerja dan Proporsi Jumlah Tenaga Kerja Formal Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018-2019

Kategori	Lapangan Usaha	% Perubahan Produktivitas TK	% Perubahan Proporsi TK Formal
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.36	2.86
B	Pertambangan dan Penggalan	8.15	-12.99
C	Industri Pengolahan	-6.04	5.89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-29.83	5.27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30.53	-5.90
F	Konstruksi	-6.40	0.13
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.53	3.13
H	Transportasi dan Pergudangan	5.28	0.33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-12.74	-7.95
J	Informasi dan Komunikasi	-52.69	-5.99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-14.55	-3.51
L	Real Estate	217.48	42.43
M, N	Jasa Perusahaan	-16.04	-12.64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-6.40	0.00
P	Jasa Pendidikan	-10.52	-1.07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-19.70	-6.83
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-25.97	-13.94
	Total	3.07	3.86

Sumber: hasil penelitian

Perkembangan angka koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 8. Dalam rentang tahun 2014 hingga 2019, koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja memiliki angka positif meskipun dengan besaran yang berbeda, kecuali pada tahun 2017. Angka koefisien yang negatif menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terjadi peningkatan output produksi akan tetapi dibarengi dengan penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap. Angka koefisien yang lebih dari 1 menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang elastis yang memiliki arti bahwa untuk setiap perubahan output produksi

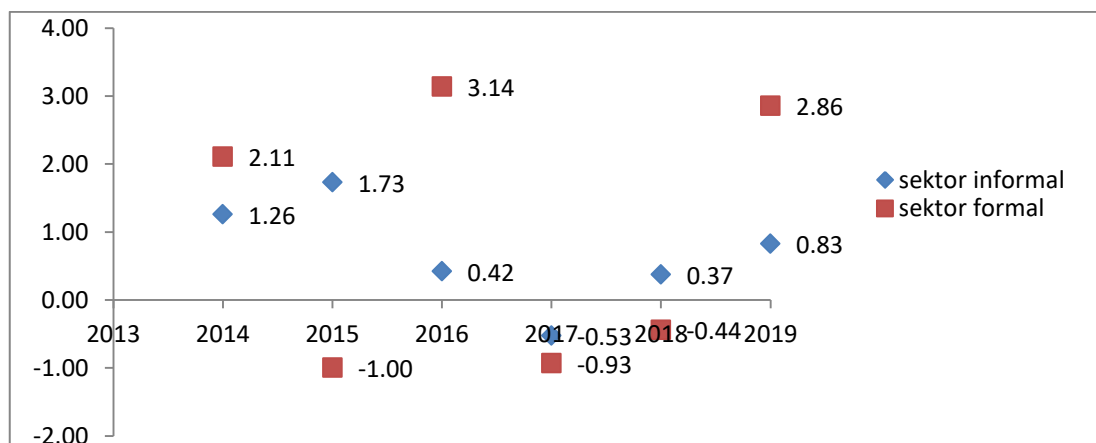
sebesar 1% maka akan diikuti oleh perubahan jumlah tenaga kerja informal di atas 1%. Nilai negatif menunjukkan hubungan perubahan yang terbalik.



**Gambar 8.** Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2019

*Sumber: hasil penelitian*

Koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja tertinggi ada di tahun 2014 yaitu sebesar 1,54 yang berarti setiap peningkatan output produksi sebesar 1% dibarengi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 1,54%. Koefisien paling rendah ada di tahun 2018 yaitu sebesar 0,10. Angka ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan output produksi sebesar 1% dibarengi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar hanya 0,10%. Untuk tahun 2017, koefisien sebesar -0,66 memiliki arti bahwa setiap penambahan output produksi sebesar 1% dibarengi dengan penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 0,66%.



**Gambar 9.** Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal di Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2019

*Sumber: hasil penelitian*

Dari Gambar 9 terlihat bahwa untuk tahun 2014, 2016 dan 2019 angka koefisien elastisitas baik formal maupun informal memiliki angka yang positif, yang berarti persentase

peningkatan output produksi dibarengi peningkatan tenaga kerja yang terserap baik di sektor formal maupun informal. Untuk tahun 2017 angka koefisien adalah negatif untuk tenaga kerja formal maupun informal. Sedangkan untuk tahun 2015 dan 2018 angka koefisien positif untuk sektor informal dan negatif untuk formal. Hal ini menunjukkan bahwa pada kedua tahun tersebut peningkatan output produksi selain dibarengi peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor informal, juga dibarengi dengan penurunan jumlah tenaga kerja di sektor formal.

Elastisitas penyerapan tenaga kerja positif tertinggi ada di tahun 2016 untuk sektor formal yaitu sebesar 3,14 (elastis). Sedangkan elastisitas terendah ada di tahun 2018 untuk sektor informal yaitu sebesar 0,37 (tidak elastis). Sedangkan untuk koefisien negatif terbesar ada pada tahun 2015 dimana koefisien elastisitas sebesar -1,00 untuk sektor formal yang memiliki arti bahwa setiap penambahan output produksi sebesar 1% dibarengi dengan penurunan jumlah tenaga kerja formal yang terserap sebanyak 1%.

Selama tahun pengamatan, terdapat tiga angka koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja formal yang memiliki tanda negatif, yaitu di tahun 2015, 2017 dan 2018. Sedangkan untuk tenaga kerja informal angka koefisien elastisitas negatif hanya terjadi pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015, 2017 dan 2018 kenaikan output produksi dibarengi dengan penurunan penyerapan tenaga kerja formal, sedangkan penyerapan tenaga kerja informal hanya mengalami penurunan pada tahun 2017.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Dengan adanya perubahan dasar analisis klasifikasi sektor penyerapan tenaga kerja yang mengalami perubahan menjadi 17 lapangan usaha, terlihat ketimpangan produktivitas tenaga kerja sektoral di Provinsi Bengkulu yang besar dan meningkat, ditunjukkan oleh nilai standard deviasi sebesar 134,38 dan 126,67 di tahun 2018 dan 411,35 & 397,25 di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya lapangan usaha (Real Estate; Informasi dan Komunikasi) dengan nilai ekstrim yang sangat tinggi dibandingkan lapangan usaha yang lain.
2. Terjadi dualisme ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu yang didominasi oleh tenaga kerja informal dengan besaran di atas 60%. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dasar mendominasi sektor informal (SD dan SMP) sedangkan tenaga

kerja dengan tingkat pendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) sebagian besar terserap pada sektor formal.

3. Elastisitas penyerapan tenaga kerja formal tertinggi (+) terjadi pada tahun 2016 sebesar 3,14 dan tertinggi (-) pada tahun 2015 sebesar -1,00. Untuk penyerapan tenaga kerja informal, elastisitas tertinggi (+) terjadi pada tahun 2015 sebesar 1,73 dan tertinggi (-) pada tahun 2017 sebesar -0,53.

## KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

1. Analisis produktivitas tenaga kerja sektoral belum dilengkapi dengan pengklasifikasian lapangan usaha menjadi sektor primer, sekunder dan tersier. Jika dapat diklasifikasikan maka gambaran perbedaan nilai tambah dan sebaran produktivitas yang timpang dapat lebih terpetakan.
2. Pembahasan belum menggabungkan kedua analisis secara komprehensif sehingga gambaran produktivitas kedua sektor tersebut belum dapat dibandingkan dan dianalisis. Hal ini disebabkan karena produktivitas tenaga kerja belum terpisah sesuai dengan dualisme ketenagakerjaan menjadi tenaga kerja formal dan informal. Ketersediaan data tersebut menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh penyedia data (BPS) agar analisis ketenagakerjaan khususnya dualisme sektor dapat lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. R. (2008). *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*. Edisi Pertama. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Almahmudi. A., Putri, N. T. & Azansyah. (2018), *Analisis Ketimpangan Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral Provinsi Bengkulu*, Laporan Penelitian, Program Pascasarjana Magister Ekonomi Terapan, FEB Universitas Bengkulu.
- Armstrong. H. & Taylor. J. (2001). *Regional Economics and Policy*. 3th edition. UK. Blackwell Publisher.
- Arsyad. L. (2005). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta. BPFE-UGM.
- Bappenas. (2009). *Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan, Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral*, Deputi Perencanaan Pembangunan Nasional
- BPS. (2019). Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Bengkulu Agustus 2019, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Diperoleh dari [www.bengkulu.bps.go.id](http://www.bengkulu.bps.go.id)

- .....(2018). Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Bengkulu Agustus 2019, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Diperoleh dari [www.bengkulu.bps.go.id](http://www.bengkulu.bps.go.id)
- ..... (2017). Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Bengkulu Agustus 2019, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Diperoleh dari [www.bengkulu.bps.go.id](http://www.bengkulu.bps.go.id)
- ..... (2016). Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Bengkulu Agustus 2019, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Diperoleh dari [www.bengkulu.bps.go.id](http://www.bengkulu.bps.go.id)
- ..... (2016). Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu 2016, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Diperoleh dari [www.bengkulu.bps.go.id](http://www.bengkulu.bps.go.id)
- Blakely. E. J. & Bradshaw. T. K. (2002). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. 3<sup>rd</sup> edition. USA. Sage Publications.
- Chrismardani.Y & Satriawan. B.(2018). *Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal di Kabupaten Bangkalan*, Media Trend 13 (1).
- Ekaputri. R. A. et al. (2018). *Peningkatan Daya Saing Modal Manusia Studi Provinsi Bengkulu*, Laporan Small Research, ISEI Cabang Bengkulu.
- Kuncoro. M. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana meneliti & menulis tesis?*. Jakarta. Erlangga.
- ..... (2012). *Perencanaan Kabupaten/kota (Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal. Kota dan Kawasan?)*. Jakarta . Salemba Empat.
- Mankiw. N. G. et al. (2008). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta .Salemba Empat.
- Putri, N.T. & Almahmudi, A. (2020). *Analisis Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Bengkulu (Teaah Posisi 3 Kabupaten Induk)*. Convergence Vol. 2 No. 1.
- Sari. N. P. (2016) *Transformasi Pekerja Informal ke Arah Formal: Analisis Deskriptif dan Regresi Logistik*, JEKT Vol. 9, No.1.
- Tridiana, C. & Widyawati D. (2018). *Dampak Upah Minimum terhadap Probabilitas Keluar dari Sektor Formal*. JEPI. Edisi Khusus Call for Paper.
- Widodo. T. (2006) *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN,
- Wijayanto. H & Ode. S. (2019). *Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia*, Administratio Vol. 10 Nomor 1.
- Witjaksono. M. (2009). *Dualisme Pasar Tenaga Kerja dan Dampak Upah Minimum*. JESP Vol. 1, No 2.